



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK KUJANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARYADI**
2. Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**
3. NHK : **177075**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **6.472.500.000**

1. Tanah Seluas 17897 m2 di KAB / KOTA MUKOMUKO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 450000 m2 di KAB / KOTA BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 17765 m2 di KAB / KOTA MUKOMUKO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 17897 m2 di KAB / KOTA BENGKULU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 79 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah Seluas 34 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
10. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.912.500.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 452 m2/300 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 1.525.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	700.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
3. MOBIL, HONDA ACCORD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	250.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.241.493.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.549.323.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.325.536.000
Sub Total	Rp.	11.538.852.000
III. HUTANG	Rp.	330.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.208.852.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.